

ANALISIS INDEKS DESA MEMBANGUN UNTUK MENGETAHUI POLA PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU

VILLAGE INDEX ANALYSIS BUILDING TO KNOW THE VILLAGE DEVELOPMENT IN GADINGREJO DISTRICT OF PRINGSEWU DISTRICT

Muhtarom, M.Sc¹, Nurhadi Kusuma², M.Pd.I, Eri Purwanti, M.Pd³.

Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pringsewu
email: muhtarom29@gmail.com¹, nurhadikusuma87@gmail.com², eripurwantimpd@gmail.com³

Dikirim 04 Juli 2018 Direvisi 26 Juli 2018 Disetujui 27 Juli 2018

Abstrak : Indeks Desa Membangun merupakan Indeks yang digunakan untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa dengan menggunakan indikator Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Tujuan Dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perkembangan pembangunan desa dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif Deskriptif. Analisis penelitian yang digunakan yaitu analisis triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas desa di Kecamatan Gadingrejo masuk dalam Klasifikasi Desa Berkembang yakni 87 %. Angka Indeks Ketahanan Sosial menjadi Indikator yang paling tinggi dalam realisasi pembangunan desa di kecamatan Gadingrejo yaitu 0,71. Hal ini menunjukkan rata-rata desa di kecamatan gadingrejo ketahanan sosialnya/pembangunan sosialnya berada dalam kalsifikasi Maju. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di gadingrejo mampu memberikan kontribusi yang positif dalam mendorong ketahanan sosial.

Kata kunci: Indeks pembangunan desa, Pembangunan desa.

Abstract : Village development Index is an index used to determine of rural development by using indicators of Social Security Index (IKS), Economic Resilience Index (IKE), and Environmental Resilience Index (IKL). The purpose of this study is to determine the pattern of development of village development in the social, economic, and environmental fields. This research uses descriptive Quantitative approach. Analysis this study using triangulation data analysis. The results showed that the majority of villages in Gadingrejo sub-district belong to the Classification of Developing Villages of 87%. The Social Security Index score is the highest indicator in the realization of village development in Gadingrejo sub-district, which is 0.71. This shows the average of villages in the sub-district of gadingrejo social resilience / social development is in advanced calcification. The village community empowerment activities in Gadingrejo are able to contribute positively in promoting social resilience.

Keywords: Village development index, Village development

PENDAHULUAN

Nawa cita yakni 9 Prioritas Program Pembangunan pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla sudah berjalan seiring dengan perjalanan Kabinet Kerja Jokowi Yusuf Kalla. Sembilan Prioritas Program Pembangunan tersebut salah satunya ialah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Kompas.com - 21/05/2014). Keberlanjutan dari Nawacita yang dulu telah menjadi jargon kampanye Jokowi ialah dicetuskannya kesembilan prioritas

program pembangunan tersebut ke dalam strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Kementerian Desa, PDTT, 2015).

Pembangunan melalui daerah pinggiran bukanlah konsep baru. Myrdal (1957), dan Richardson (1978) menyatakan hubungan antara pusat dan pinggiran dilukiskan dengan dua efek, yaitu efek sebar 'spread effect' dari pusat ke pinggiran dan efek serap balik 'back wash effect' dari pinggiran ke pusat (Muhtarom, 2015). Artinya pembangunan harus dimulai dari arah pinggiran adalah

sebuah analisis logis (*logic-analitic*) untuk mempercepat laju pertumbuhan pembangunan.

Alasan lain adalah munculnya ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga ber-dampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah ke-miskinan, menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 8.60% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 14.70% (Putra, 2016).

Keberlanjutan dari adanya program ini yaitu salah satunya adalah ditetapkan Undang-undang Desa No 6 tahun 2016. Menurut UU no. 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU desa tahun 2016 tersebut yang sekarang menjadi pendukung utama untuk mempercepat ketercapaian program pembangunan desa. Oleh karena itu masyarakat desa sebagai subjek utama dari program ini akan mendapatkan perhatian lebih oleh negara khususnya dalam peningkatan kualitas sumber dayanya agar menjadi manusia yang berdikari dan mandiri. Selanjutnya diharapkan akan berimplikasi terhadap kondisi desa yang maju, mampu mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada untuk kemakmuran desa.

Sedangkan Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011, h.3) menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati sekumpulan

manusia yang hidup bersama, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Berdasarkan pengertian di atas desa saat ini mempunyai kekuatan yang besar untuk mengolah segala potensi yang ada di desa. Hal ini akan diperkuat dengan ketersediaan SDM yang sudah ada di desa.

Menurut Sutiyono (2012) Sejak jaman kolonial, Orde lama, dan Orde Baru, masyarakat desa hanya diposisikan sebagai objek bukan sebagai subjek pembangunan. Di era reformasi, menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan merupakan hal yang penting. Apalagi sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah pedesaan dengan jumlah penduduknya yang besar. Oleh karena itu menggali potensi desa dan sumber-sumber produksi yang selama ini ditelantarkan penting untuk diberdayakan.

Salah satu ukuran bagaimana program ini berdampak positif terhadap pembangunan desa dengan melihat hasil dari indeks pembangunan desa. Indeks pembangunan desa ini yang kemudian direalisasikan dengan peraturan menteri desa no 02 tahun 2016 tentang indeks desa membangun. Kementrian desa melalui permendes no 2 tahun 2016 tersebut, telah menetapkan beberapa indikator yang memberikan kemudahan bagi desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desa (Setyobakti, 2017). Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri, sedangkan tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah a) menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan b) menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa (permendes, 2015).

Indikator yang digunakan dalam menetapkan status desa dalam indeks desa

membangun diantaranya adalah **IKS : Indeks Ketahanan Sosial, IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi, IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)**. Sedangkan klasifikasi status desa dibedakan menjadi lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri (Kementerian Desa, PDTT, 2015).

Tabel 1. Klasifikasi Desa

Berdasarkan IS, IEK dan IL

No.	STATUS DESA	NILAI BATAS
1.	Sangat Tertinggal	$\leq 0,491$
2.	Tertinggal	$> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3.	Berkembang	$> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4	Maju	$> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5.	Mandiri	$> 0,815$

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan sebuah analisis ilmiah terhadap Indeks desa Membangun untuk mengetahui pola perkembangan pembangunan desa di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Desa

The village is principally a place of residence and not primarily a business center. It is composed chiefly of farm dwellings and their associated outbuildings, demikian pendapat Finch yang dikutip oleh Prof.Bintarto (1984:12).

Desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan

pemerintahan pemerintahan sendiri (Sutardjo Kartohadikusumo,1953).

Menurut Drs.Sapari Imam Asy'ari 1993:93 karakteristik desa meliputi:

- Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar (jarang). Desa berhubungan erat dengan alam, ini disebabkan oleh lokasi geografis untuk petani, serta bangunan tempat tinggal yang jarang dan terpencar.
- Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
- Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.
- Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, (P.J.M.Nas, 1979:28-29 dan Soetardjo,1984:16) dimana aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah.

2. Konsep Desa Membangun

Todaro (2000:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Menurut Rostow dalam Arief (1996: 29) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya.

Menurut Gant dalam Suryono (2001:31), tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan

ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono, 2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara.

3. Indek Desa Membangun (IDM)

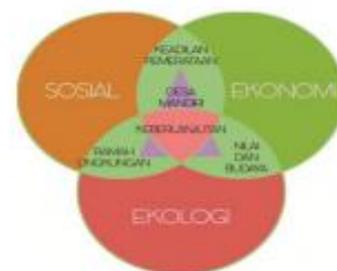
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober 2016. Menurut Marwan Jafar, IDM bisa dijadikan rujukan untuk pengentasan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di Indonesia. Penentuan IDM dengan meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama proses kemajuan dan pemberdayaan desa.

IDM menggunakan pendekatan yang bertumpu pada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal.

IDM ini sendiri dibuat untuk memperkuat pencapaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. IDM dipakai sebagai acuan dalam melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya untuk mewujudkan kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Desa Membangun Indonesia tetap dihadapkan pada kenyataan kemiskinan di Desa. Maka, ketersediaan data dan pengukuran sangat dibutuhkan. Khususnya dalam pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa menjadi lima status yakni Desa sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Klasifikasi dalam lima status itu untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan.



Desa berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan seperti guncangan ekonomi, bencana alam, atau konflik sosial maka dapat memengaruhi status Desa Berkembang turun menjadi Desa Tertinggal. Sementara, apabila Desa Berkembang mempunyai

kemampuan dalam mengelola potensi, informasi / nilai, inovasi / prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Status IDM berbeda dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dikeluarkan oleh Bappenas. Bappenas membagi perkembangan status desa dalam tiga klasifikasi yakni Desa Tertinggal, Berkembang, dan Mandiri. Masing-masing status terbagi lagi menjadi tiga perkembangan, mula, madya dan lanjut. Terdapat lima dimensi dalam IPD antara lain: pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas / transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan menggunakan data sensus Potensi Desa (Posdes) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir pada April 2014, bisa lihat perbandingan antara Indeks Desa Membangun dengan Indeks Pembangunan Desa.

Perbandingan Status Desa antara IDM dan IPD

Status Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks Pembangunan Desa
Sangat Tertinggal	13.453 Desa (18,25 %)	-
Tertinggal	33.592 Desa (45,57 %)	19.944 Desa (26,92 %)
Berkembang	22.882 Desa (31,04 %)	51.127 Desa (69 %)
Maju	3.608 Desa (4,89 %)	-
Mandiri	174 Desa (0,24 %)	3.022 Desa (4,08 %)

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan data yang valid, reliabel, dan relevan dengan yang dibutuhkan. Selain itu, dengan pendekatan diskriptif kuantitatif juga dilakukan observasi yang lebih mendalam dan teliti terhadap objek-objek penelitian, sehingga data-data yang diperoleh lebih akurat dan mendasar.

Istrumen pengumpulan data dengan menggunakan Angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data sedangkan analisis datanya menggunakan analisis statistik sederhana.

Studi ini akan dilaksanakan di wilayah kabupaten Pringsewu, khususnya desa-desa yang ada di Kecamatan Gadingrejo. Pemilihan lokus ini dimaksudkan agar dapat menjawab permasalahan penelitian, yakni Indikator Pembangunan yang paling dominan di desa di wilayah Kecamatan Gadingrejo. Populasi penelitian ini mencakup desa yang ada di Kecamatan Gadingrejo. Karena subyek populasi dalam penelitian ini tidak mencapai seratus, maka seluruh populasinya diambil sebagai sampel sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi (Arikunto:2002).

Informasi yang valid menjadi bagianterpenting dalam penelitian ini. Selain data yang berupa hasil dari pengolahan data IDM informasi dari berbagai jenis sumber juga diperlukan, terutama yang menguasai tentang persoalan pembangunan yang ada di desa, maka diperlukan informan informan yang benar-benar mengetahui persoalan tersebut secara mendalam. Para informan yang diusulkan dalam penelitian ini antara lain: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua RW, Ketua RT, sesepuh desa, tokoh masyarakat, dan para anggota masyarakat yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan program pembangunan desa.

Adapun cara pengumpulan data dapat diperinci sebagai berikut: (1) Angket, yakni cara yang digunakan untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana subjek pembangunan berpartisipasi dalam pembangunan desa. (2) Wawancara, yakni cara yang dipergunakan peneliti untuk mengungkap bagaimanakah para subjek penelitian memberi makna terhadap aktivitas pembangunan desa . (3) Observasi, yakni cara yang dipergunakan peneliti untuk melihat dan mengetahui aktivitas pembangunan desa di wilayah

Kecamatan Gadingrejo (3) Dokumentasi, yakni cara yang dipergunakan peneliti untuk meramu dan menempatkan terminologi dan sumber-sumber teori dalam penelitian ini yaitu teori yang menyangkut pembangunan desa.

Adapun Fokus dalam penelitian ini adalah: pertama, pembangunan desa dalam bidang sosial kemasyarakatan.. Kedua, pembangunan desa dalam bidang ekonomi. Ketiga, pembangunan desa dalam bidang lingkungan. Teknik yang dipergunakan untuk menganalisis data penelitian (Sutiyono:2012), adalah teknik analisis deskriptif interpretatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Memilih dokumen/data yang relevan dan memberi kode. (2) Membuat catatan objektif, dalam hal ini sekaligus melakukan klasifikasi dan mengedit (mereduksi) jawaban. (3) Membuat catatan reflektif, yaitu menuliskan apa yang sedang dipikirkan peneliti sebagai interpretasi dalam sangkut pautnya dengan catatan objektif. (4) Menyimpulkan data dengan membuat format berdasarkan teknik analisis data yang dikendaki peneliti. (5) Melakukan triangulasi yaitu mengecek kebenaran data dengan cara menyimpulkan data ganda yang diperoleh melalui tiga cara: (1) memperpanjang waktu observasi di lapangan dengan tujuan untuk mencocokkan data yang telah ditulis dengan data lapangan, (2) mencocokkan data yang telah ditulis dengan bertanya kembali kepada informan, dan (3) mencocokkan data yang telah ditulis dengan sumber pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari tahun 2015-2019 mulai melakukan program-program yang lokus utamanya lebih kepada prioritas pembangunan desa yang tadinya tidak berdaya atau kurang berdaya untuk menjadi berdaya. Program

Nawacita sebagai teknisi penggerak undang-undang desa no 6 tahun 2015 yang juga telah diadopsi penuh menjadi *Agenda Pembangunan Nasional* dalam RPJMN 2015 – 2019 adalah bukti keseriusan pemerintah dalam membangun desa, mengentaskan kemiskinan masyarakat desa serta menjadikan desa sebagai desa yang mandiri dan berdikari.

Ada 3 pendekatan yang diambil oleh Kementerian Desa, PDTT untuk mendorong desa semakin lebih cepat dalam melaksanakan pembangunan. *Pertama, Jaring Komunitas Wiradesa.* Pendekatan ini bertujuan untuk memperbanyak kesempatan dan pilihan masyarakat desa dalam upaya menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan kesejahteraan, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektiva. Sampai saat ini masalah yang dihadapi masyarakat desa adalah ketidakberdayaan dan marjinalisasi. Masalah inilah yang menjadi faktor utama penyebab kemiskinan di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu diharapkan dengan *Jaring Komunitas Desa* ini mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga Desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan lokal Desa.

Kedua, Lumbung Ekonomi Desa. Desa sebagai entitas wilayah terkecil dalam suatu negara, memiliki potensi sumber daya yang sangat beragam. Ketika potensi tersebut mampu untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa sendiri maka akan menjadi lumbung komoditas ekonomi. Pengembangan lumbung ekonomi tidak akan pernah lepas dengan masalah modal, jaringan dan informasi. Oleh karena itu lembaga ekonomi yang dibentuk di desa harusnya sudah mempunyai kapasitas dan kualitas yang sudah mumpuni. Dalam konteks ini BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai penggerak perekonomian harus mampu dan tanggap dengan kesempatan

dan peluang ekonomi yang bisa dikembangkan.

Ketiga, *Lingkar Budaya Desa*. Budaya desa merupakan ruh keterkaitan emosional warga yang terbentuk dari kebersamaan persaudaraan, kekerabatan dan kolektivitas yang mengakar lama dalam masyarakat. Budaya desa yang seperti ini akan mampu mengarahkan, membimbing secara kolektif untuk tetap pada jalur dan tujuan program pembangunan. Norma dan nilai budaya desa yang telah ada sejak lama secara otomatis akan mengontrol program tersebut hingga menghasilkan kemajuan hingga sampai pada kesejahteraan masyarakat.

Tiga pendekatan inilah yang kemudian menghasilkan tiga kategori dalam melakukan penilaian keberhasilan program pembangunan desa atau yang disebut dengan indeks Desa Membangun (IDM) yaitu indeks ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi (lingkungan).

1. Indeks Ketahanan Sosial

Berdasarkan hasil analisis data di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dihasilkan bahwa sebagian besar desa dari 23 desa berada pada klasifikasi maju. Hal ini bisa dilihat pada grafik IKS pada halaman selanjutnya.

Berdasarkan grafik IKS dapat disimpulkan bahwa dari 23 desa di Kecamatan Gadingrejo terdapat 14 desa yang nilai IKS nya di atas 70 %, artinya sebagian desa di kecamatan gadingrejo indeks ketahanan sosialnya berada dalam klasifikasi desa maju yaitu 61%. Sedangkan desa yang berada dalam klasifikasi berkembang indeks ketahanan sosialnya adalah 9 desa (Yogyakarta Induk, Kediri, Klaten, Gadingrejo Timur, Bulurejo, tambahrejo Barat, tambahrejo dan parerejo).

Dari 23 desa yang ada di kecamatan gadingrejo, desa dengan nilai Indeks ketahanan sosial tertinggi adalah desa

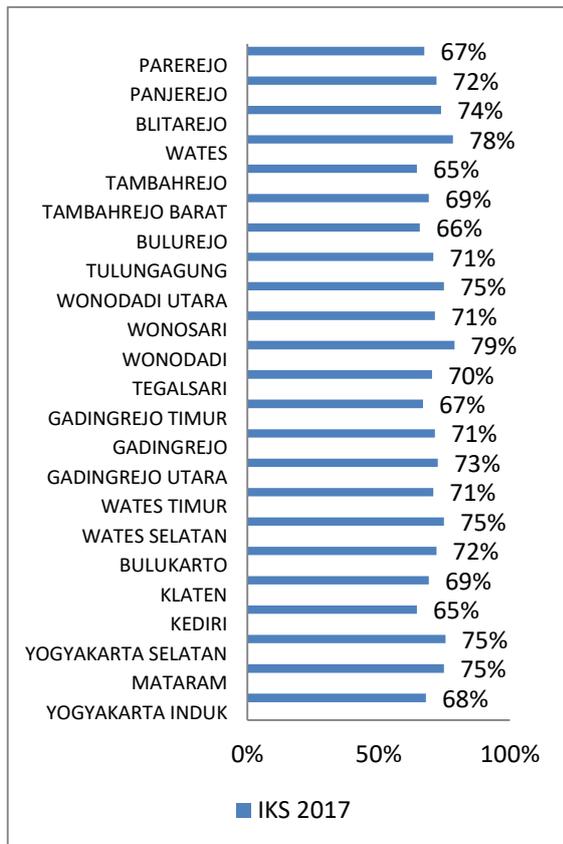
Wonodadi yaitu 79 % sedangkan desa dengan nilai terendah adalah desakediri dan Tambahrejo yang sama-sama memiliki nilai indeks ketahanan sosial sebesar 65%.

Desa Wonodadi memiliki Nilai Indeks tertinggi karena dipengaruhi oleh adanya fasilitas yang cukup memadai seperti Perguruan Tinggi (STIT Pringsewu, STMIK Pringsewu, AISAH Muhammadiyah Pringsewu).

Grafik IKS di atas juga menunjukkan bahwa tidak adanya desa di kecamatan gadingrejo yang nilai Indeks IKS nya masuk dalam kategori tertinggal serta belum ada desa yang masuk dalam kategori Mandiri.

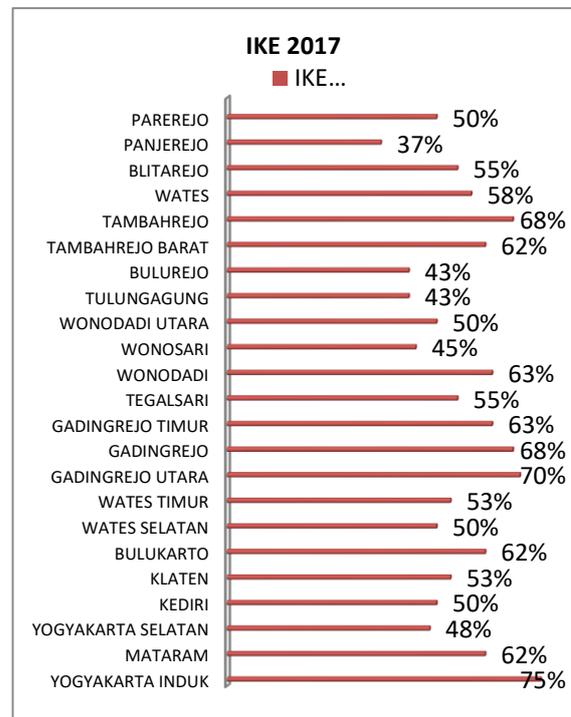
Nilai Indeks Ketahanan Sosial yang berada dalam klasifikasi Berkembang (9 desa) dan Maju (14 Desa) menggambarkan bahwa sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, keamanan dan sosial di kecamatan Gadingrejo sudah baik dan ketersediaan sarana prasarananya mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecamatan gadingrejo.

Grafik. 1. Indeks Ketahanan Sosial Desa di Kecamatan Gadingrejo tahun 2017



Sumber: Analisis Data IDM

2. Indeks Ketahanan Ekonomi
Grafik.2 Indeks Ketahanan Ekonomi Seluruh Desa di Kecamatan Gadingrejo tahun 2017



Sumber : Analisis Data IDM

Indeks Ketahanan Ekonomi dalam memberikan gambaran dengan memperhitungkan indikator-indikator ekonomi yang ada di desa seperti jumlah industri, keragaman produksi ekonomi desa, jumlah pasar, toko, warung, Bank , Koperasi Desa atau Bumdes, lembaga ekonomi lain, moda transportasi, keterbukaan wilayah dan kualitas jalan.

Dari grafik indeks ketahanan ekonomi pada halaman sebelumnya menunjukkan bahwa desa dengan nilai $\leq 0,491$ atau 49% sejumlah 5 desa, desa dengan nilai $> 0,491$ dan $\leq 0,599$ sejumlah 9 desa, desa dengan nilai $> 0,599$ dan $\leq 0,707$ sejumlah 8 desa, dan desa dengan nilai $> 0,707$ dan $\leq 0,815$ hanya ada 1 desa.

Tabel 3. Klasifikasi IKE desa di Kecamatan Gadingrejo tahun 2017

No.	STATUS DESA	NILAI BATAS	JUMLAH DESA
1.	Sangat Tertinggal	$\leq 0,491$	5 (Panjerejo, Bulurejo, Tulungagung, Wonosari, Yogyakarta Selatan)
2.	Tertinggal	$> 0,491$ dan $\leq 0,599$	9 (Parerejo, Blitarejo, Wates, Wonodadi Utara, Tegalsari, wonasari, wates Timur, Wates Selatan, Klaten, Kediri)
3.	Berkembang	$> 0,599$ dan $\leq 0,707$	8 (Tambahrejo, Tambahrejo Barat, Wonodadi, Gadingrejo, Gadingrejo Timur, Gadingrejo Utara, Bulukarto Mataram)
4	Maju	$> 0,707$ dan $\leq 0,815$	1 (Yogyakarta Induk)
5.	Mandiri	$> 0,815$	-

Sumber : Analisis Data

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah desa dengan klasifikasi Indeks Ketahanan Ekonomi Tertinggal lebih banyak daripada desa yang berada dalam klasifikasi Berkembang. Desa dengan nilai IKE dalam klasifikasi maju hanya ada 1 desa sedangkan dengan Klasifikasi Sangat Tertinggal sejumlah 5 Desa. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara desa dengan ketahanan ekonomi maju dengan ketahanan ekonomi tertinggal maupun sangat tertinggal.

Adanya kesenjangan ketahanan ekonomi tersebut menggambarkan bahwa

ketersebaran fasilitas ekonomi di kecamatan gadingrejo belum merata. Masih ada beberapa desa yang menjadi wilayah pusat perkembangan ekonomi (district center) dan wilayah pinggiran (rural). Pada dasarnya konsep ini akan mampu memberikan keseimbangan pembangaunan wilayah ketika antara wilayah pusat perdagangan dan wilayah pinggiran mampu bersinergi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Akan tetapi jika melihat konteks tingkat atau Indeks ketahanan ekonomi dengan indikator –indikator yang telah dijelaskan seakan-akan memunculkan kesenjangan antar wilayah desa.

Yogyakarta induk memiliki nilai indeks ketahanan ekonomi yang besar karena pembangunan sarana prasarana ekonomi yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh pembangunan kantor PEMDA Kabupaten Pringsewu di wilayah desa Yogyakarta Selatan.

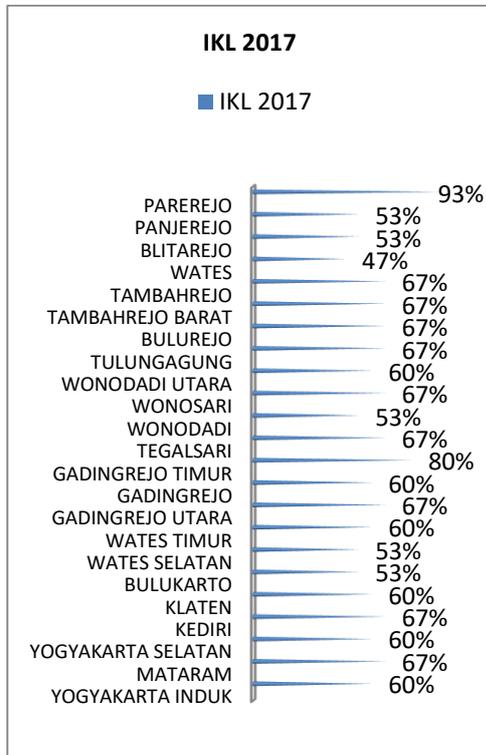
3. Indeks Ketahanan Ekologi

Desa Ekologi adalah sebuah sistem kelola wilayah pedesaan yang terpadu dan melibatkan seluruh pihak baik dalam proses tata kuasa, kelola, produksi, dan konsumsi. Dalam perspektif ekologi, hubungan keterkaitan dan ketergantungan antara seluruh komponen ekosistem harus dipertahankan supaya stabil dan seimbang (*homeostatis*). Maka Desa Ekologi atau Wilayah Kelola Rakyat sebagai sebuah pendekatan penting bagi upaya perbaikan pengelolaan desa sebagai pendukung utama pembangunan nasional.

Dalam perhitungan nilai indeks ketahanan ekologi, indikator yang diambil secara garis besar memuat (3) tiga kategori yakni Kualitas Lingkungan, Tingkat Kerawanan Bencana dan Respon/Tanggap Bencana. Kualitas Lingkungan dilihat dari tingkat pencemaran air, udara, tanah, dan limbah. Tingkat Kerawanan Bencana dilihat dari frekuensi bencana banjir, longsor dan kebakaran (kekeringan) yang terjadi dalam 1 tahun, sedangkan Respon /

Tanggap Bencana berkaitan dengan ada tidaknya peringatan dini, Perkap Keselamatan, jalur evakuasi dan mitigasi bencana.

Grafik 3 Indeks Ketahanan Ekologi Desa di Kecamatan Gadingrejo Tahun 2017



Sumber : Analisis Data

Kecamatan Gadingrejo adalah kecamatan dengan jumlah desa dan penduduk terbanyak di kabupaten Pringsewu. Selain itu kecamatan gadingrejo juga menjadi arus jalan arteri (utama) wilayah selatan pulau sumatra. Kondisi ini turut serta mempengaruhi perkembangan pembangunan wilayah khususnya desa-desa yang terlewati oleh arus jalan arteri. Akan tetapi keadaan ini tidak secara langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan pembangunannya, karena keadaan sumber daya manusia yang ada di desa juga menjadi faktor penentu.

Berdasarkan hasil perhitungan IKS, IKE dan IKL dapat disimpulkan bahwa Indkes Desa Membangun di kecamatan Gadingrejo menunjukkan bahwa sebagian besar desa dikecamatan gadingrejo masuk

dalam klasifikasi desa berkembang (lihat Grafik. 3). Nilai rata-rata dari ke 23 desa di kecamatan gadingrejo adalah 0,63. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketahanan desa baik dari segi sosial, ekonomi maupun lingkungan sudah cukup baik.

Tabel. 3. Indeks Desa Membangun kecamatan Gadingrejo tahun 2017

No.	STATUS DESA	NILAI BATAS	JUMLAH DESA
1.	Sangat Tertinggal	$\leq 0,491$	-
2.	Tertinggal	$> 0,491$ dan $\leq 0,599$	3 (Panjerejo, Bulurejo, Wates Selatan)
3.	Berkembang	$> 0,599$ dan $\leq 0,707$	20 (Parerejo, Blitarejo, Wates, Tambahrejo, Tambahrejo Barat, Tulungagung, Wonodadi, Wonodadi Utara, Wonosari, Tegalsari, Gadingrejo Timur, Gadingrejo Utara, Kalten, Kediri, Bulukarto Mataram, Yogyakarta Induk)
4.	Maju	$> 0,707$ dan $\leq 0,815$	-
5.	Mandiri	$> 0,815$	-

Sumber : Analisis Data

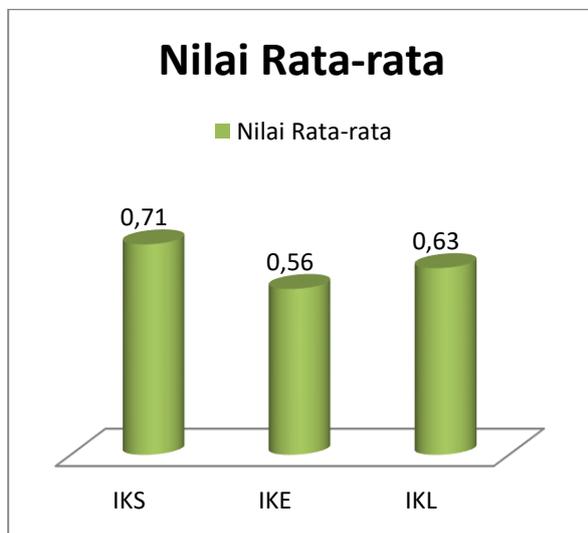
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat desa yang masuk dalam klasifikasi desa tertinggal yakni 3 desa, sedangkan 20 desa masuk dalam kategori Berkembang. Data ini menunjukkan mayoritas desa sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, karena 87 % desa di kecamatan gadingrejo sudah menjadi desa yang Berkembang. Selain itu data ini juga menunjukkan perkembangan

pembangunan baik dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan tersebar hampir merata di seluruh desa.

4. Pola Perkembangan Pembangunan Desa

Dari ketiga kategori perhitungan IDM yaitu IKS, IKE dan IKL di desa seluruh kecamatan gadingrejo, nilai indeks yang paling besar memberikan kontribusi terhadap nilai IDM nya adalah Indeks Ketahanan Sosial. nilai rata-rata IKS dari seluruh desa di kecamatan Gadingrejo adalah 0,71.

Grafik. 4. Nilai Rata-rata IKS, IKE, dan IKL



Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan sosial yang telah dilakukan desa di kecamatan gadingrejo pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan kegiatan pembangunan dalam bidang ekonomi maupun lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan memberikan dampak yang positif bagi sumber daya masyarakat pedesaan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa memang menjadi bidang wajib yang harus diterapkan dan direalisasikan oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi PMD (12 Juni 2017) menyatakan bahwa :“pembangunan

desa dari tahun awal bergulirnya dana desa yakni tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mayoritas masih fokus dalam bidang pembangunan fisik sarana prasarana sosial/desa dan pemberdayaan masyarakat”.

Hal ini senada dengan yang telah diungkapkan oleh pendamping profesional desa kecamatan Gadingrejo bapak Taufik Hidayat. Beliau mengatakan bahwa: “fokus pembangunan desa-desa masih berada di bidang pemberdayaan dan fisik, untuk pengembangan ekonomi baru mulai genjar awal tahun 2018, sehingga untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih belum berjalan secara maksimal”

Tujuan dari kegiatan pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas maupun kualitas sumberdaya masyarakat desa. Sehingga wajib diselenggarakannya pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi tentang peningkatan kapasitas diri ataupun kelompok.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Mayoritas desa di Kecamatan Gadingrejo masuk dalam Klasifikasi Desa Berkembang yakni 87 %.
- 2) Angka Indeks Ketahanan Sosial menjadi Indikator yang paling tinggi dalam realisasi pembangunan desa di kecamatan Gadingrejo yaitu 0,71. Hal ini menunjukkan rata-rata desa di kecamatan gadingrejo ketahanan sosialnya/pembangunan sosialnya berada dalam kalsifikasi Maju.
- 3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di gadingrejo mampu memberikan kontribusi yang positif dalam mendorong ketahanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra kusuma putra, ratih nur pratiwi, suwondo (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Jurusan administrasi publik, fakultas ilmu administrasi, universtas brawijaya, malang. *jurnal administrasi publik (jap)*, vol. 1, no. 6. Hal. 1203-1212 | 1203
- <https://sekolahdesa.or.id/indeks-desa-membangun-dan-pembangunan-desa/>
- Kementerian desa pdtt. 2015 indek desa membangun. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul ""nawa cita", 9 agenda prioritas jokowi-jk", <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jk>.
- Moh. Hudi setyobakti., (2017). Identifikasi masalah dan potensi desa berbasis indek desa membangun (IDM) di desa gondowangi kecamatan wagir kabupaten malang. *Jurnal penelitian ilmu ekonomi wiga* vol. 7, maret 2017, hal 1 – 14
- Muhtarom, Muta'ali. L., Sudrajat., (2015) Pengaruh Pusat Pertumbuhan Wilayah Terhadap Konversi Lahan dan Swasembada Pangan di Kabupaten Pringsewu. *MGI* Vol. 29, No. 2, September 2015 (163-171).
- Permendesa nomor 2 tahun 2016, tentang indeks desa membangun Pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan program desa wisata di daerah istimewa yogyakarta
- Santoso R.A. (1988). Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alumnii.
- Sugiono (2009). Metode penelitian kuantitatif & kualitatif. Bandung, alfabet.
- Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isu Pembangunan. Malang: Universitas Malang Press.
- Sutiyono. (2011). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Program Desa Wisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Fakultas Bahasa dan Seni, UNY
- Tersedia:<https://doi.org/10.22146/mgi.13118>
- Wahjudin, sumpeno. (2011), Perencanaan Desa Terpadu Banda Aceh, Reinforcement Action And Development.
- J.Cohen,Bruce.(1983).*Sosiologi Pedesaa n.Suatu Pengantar*.Rajawali Pers. Jakarta
- Safari Imam Asy'ari.(1983).*Pengantar sosial*. Karya Anda. Surabaya
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogjo.(1989).*Sosiologi Pedesaan*.Yogyakarta.Gajah Mada.University Press
- Santoso, Julio Adi.(2006).*Departemen Ilmu Komputer IPB*.Bogor
- Tilaar,H.A.R.(2004).*Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dan transformasi pendidikan nasional*. Grassindo .Jakarta.
- Yulianti, Yayuk dan Poernomo, Mangku. (2003). *Sosilogi Pedesaan*.Lappera Pustaka Utama. Yogyakarta